

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Sodiki, *Kejahatan Mayantara*, Refika aditama, Bandung, 2005.
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Komputer*, Univ. Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1999.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Asril Sitompul, *Hukum Internet*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan hukum pidana: edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Mukti Fajar ND, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana prenada, Jakarta, 2005.
- Purnianti, Moh. Kemal Darmawan, *Mashab dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Graha ilmu, Jakarta, 2014.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus; Prita Mulyasari)*, Rineka cipta, Jakarta, 2009.
- Soejono, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1973.

Sudarto, *Hukum Pidana Jilid II*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1991.

JURNAL

Abdullah S, Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dan Non Hukum Pidana (Non Penal) dalam Menanggulangi Aliran Sesat, *Jurnal Law Reform*, Vol. 4, No. 2, 2017.

Choiroh Lailatul Utiya, Pemberitaan Hoax perspektif Hukum Pidana Islam, Al-Jinayah: *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 2, 2017.

Elvia Marissa, Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (hoax), *Jurnal Poenale*, Vol. 6, No. 1, 2018.

Firmansyah R, Web Klarifikasi Berita Untuk Meminimalisir Penyebaran Berita Hoax, *Jurnal Informatika*, Vol. 4, No. 2, 2017.

Gunarto, Marcus Priyo, Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pidana, *Jurnal Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 21, No. 1, 2009.

Ilyas Amir, Asas-asas Hukum Pidana, memahami tindak pidana dan Pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pidanaan, *Jurnal Rangkang Education*, Vol. 1, No. 2, 2012.

Pratama, A. G., & Pradekso, Pengaruh Terpaan Berita Hoax dan Persepsi Masyarakat Tentang Kualitas Pemberitaan Televisi Berita Terhadap Intensitas Menonton Televisi Berita, *Jurnal Interaksi Online*, Vol. 6, No. 4, 2018.

Rasywir E & Purwarianti A, Eksperimen pada Sistem Klasifikasi Berita Hoax Berbahasa Indonesia Berbasis Pembelajaran Mesin, *Jurnal Cybermatika*, Vol. 3, No. 2, 2016.

Siswoko, Kurniawan Hari, Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau 'Hoax', *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 1, No. 1, 2017.

Sutantohadi A, Bahaya Berita Hoax dan Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Terhadap Toleransi Bermasyarakat, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, No. 1, Vol. 1, 2018.

SKRIPSI& TESIS

Rani Salpiana, Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Proses Peradilan Menurut RUU KUHP Tahun 2015, *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2018.

Wisnubroto Aloysius, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, *Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro*, 1997.

WEBSITE

Ayu Yuliani, “Ada 800.000 Situs Penyebar Hoax di Indonesia”
https://kominfo.go.id/content/detail/12008/ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/0/sorotan_media

Damang Averroes Al-Khawarizmi “Hukum Pidana Bagi Penyebar Hoax”,
<http://www.negarahukum.com/hukum/pidana-bagi-penyebar-hoax.html>

Dara Purnama, “Cara Polri Cegah Tindak Penyebar Berita Hoax”,
<https://news.okezone.com/read/2017/01/05/337/1584103/cara-polri-cegah-dan-tindak-penyebar-berita-hoax>

Direktori Mahkamah Agung,<https://putusan.mahkamahagung.go.id>

Indriani, “Ahli : Hoax Merupakan Kabar yang Direncanakan”,<https://www.antaranews.com/berita/606085/ahli-hoax-merupakan-kabar-yang-direncanakan>

Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”
https://www.academia.edu/9294840/gagasan_negara_hukum_indonesia

Maria Ulfa, “Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong Hoax di Masyarakat”
<http://lbhpengayoman.unpar.ac.id/notulensi-siaran-radio-01-februari-2017-pengaturan-hukum-penyebaran-berita-bohong-hoax-di-masyarakat/>

MT Indonesia, “Hasil Survey Mastel Tentang Wabah Hoax Nasional”
https://www.bkkbn.go.id/pocontent/uploads/Infografis_Hasil_Survey_M_ASTEL_tentang_Wabah_Hoax_Nasional.

Mth, “Kelola Media Sosial, Kampanyekan Kebijakan pemerintah”
https://kominfo.go.id/content/detail/10372/kelola-media-sosial-kampanyekan-kebijakan-pemerintah/0/berita_satker

Muhammad Syaifullah, “Penyebar Hoax Soal Sultan HB X Divonis Penjara 2 Tahun 6 Bulan”,<https://nasional.tempo.co/read/901908/penyebar-hoax-soal-sultan-hb-x-divonis-penjara-2-tahun-6-bulan>

Ririn Husnul Khotimah, “Fenomena Hoax di Indonesia”,
https://www.kompasiana.com/ririnhusnul/fenomena-hoax-di-indonesia_59018ba1f47e611f16e50baa

Romeltea, “Pengertian dan Ciri Hoax”<http://romeltea.com/pengertian-hoax-dan-ciri-cirinya/>

Santo Ari, “Tulisan Hoax Yang Dilaporkan Sri Sultan Hamengku buwono X”<http://jogja.tribunnews.com/2017/04/19/inilah-isi-tulisan-hoax-yang-dilaporkan-sri-sultan-hamengku-buwono-x>

Sofia Hasanah, “Arti Berita Bohong dan Menyesatkan Dalam UU ITE”<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eef8233871f5/arti-berita-bohong-dan-menyestakan-dalam-uu-ite>

Sudut Hukum, “Teori Pidana”,
<https://www.suduthukum.com/2015/03/teori-pidana.html>

Sudut Hukum, “Unsur-Unsur Tindak Pidana”,<https://www.suduthukum.com/2016/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html>

Yulida Medistiara, “Selama 2017, Polri Tangani 3.325 Kasus Ujaran Kebencian”, <https://news.detik.com/berita/d-3790973/selama-2017-polri-tangani-3325-kasus-ujaran-kebencian>

Perundang-Undangan

Republik Indonesia, 1946. *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.*

Republik Indonesia, 2008. *Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Republik Indonesia, 2016. *Undang-Undang No. 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*